



Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia

Muhammad Fuad Fathul Majid¹, Hasman Zhafiri Muhammad², Imam Dinata³,
Tommy Pratama⁴

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ^{2,3}Universitas Islam Indonesia, ⁴UIN Sultan Syarif Kasim
Riau

*Correspondence e-mail; 20201022001@students.uin-suka.ac.id

Abstract

This research examines the complex relationship between Islam and politics in the context of Indonesia's national history. In the course of its history, Indonesia has witnessed a deep interaction between Islam and the world of politics. This study analyzes how Islam has influenced political dynamics in Indonesia, both as a source of inspiration and as a determining factor in political decisions. Through chronological analysis, this study reviews the key events that describe the evolution of this relationship, including the influence of religion in the struggle for independence, the role of Islamic parties, and the impact of Islam in shaping state policy. This research also highlights how politics has also influenced the interpretation and practice of Islam in Indonesia. The results of this study provide in-depth insight into how the interaction between Islam and politics has shaped the path of Indonesian history, as well as its implications in today's social and political context.

Key words: *Indonesia, Politics, Islamic Relations, National History*

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan yang kompleks antara agama Islam dan politik dalam konteks sejarah nasional Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah menyaksikan interaksi yang mendalam antara agama Islam dan dunia politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana agama Islam telah mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, baik sebagai sumber inspirasi maupun sebagai faktor penentu dalam keputusan politik. Melalui analisis kronologis, studi ini mengulas peristiwa-peristiwa kunci yang menggambarkan evolusi hubungan ini, termasuk pengaruh agama dalam perjuangan kemerdekaan, peran partai-partai Islam, dan dampak Islam dalam pembentukan kebijakan negara. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana politik juga telah mempengaruhi interpretasi dan praktik agama Islam di Indonesia. Hasil studi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana interaksi antara Islam dan politik telah membentuk jalur sejarah Indonesia, serta implikasinya dalam konteks sosial dan politik masa kini.

Kata-kata kunci: Indonesia, Politik, Relasi Islam, Sejarah Nasional

PENDAHULUAN

Islam dan politik adalah hubungan yang sangat erat dan keduanya saling berkaitan. Pakar politik Barat, Dr. V. Fitzgerald memiliki pandangan bahwa Islam tidak semata-mata

hanya sebuah agama (*a religion*), melainkan juga sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun dalam beberapa dekade terakhir ada sebagian golongan dari umat Islam yang mengaku sebagai golongan modernis, dengan berusaha memisahkan pandangan yang bersifat fundamental, akan tetapi, gagasan keislaman yang dibangun dari keduanya saling bergandengan, seiring sehingga tidak dapat dipisahkan.¹

Hal inilah yang akhirnya berdampak dalam proses tumbuh dan berkembangnya politik Islam di Nusantara. Nusantara yang awalnya pusat dari kekuatan Hindu-Budha, seiring dengan berjalannya waktu berubah sebagai tempat penyebaran dan perkembangan Islam, dibuktikan oleh munculnya pemerintahan politik yang berlandaskan Islam sebagai ajaran resminya.

Kekuatan politik pemerintahan Islam di Nusantara mulai mengalami kemunduran karena kedatangan bangsa Eropa yang kemudian berhasil menguasai hegemoni politik di wilayah Nusantara. Hal ini diawali dengan kedatangan bangsa Eropa yang dalam perkembangan selanjutnya tidak memberikan ruang perkembangan politik terhadap institusi Islam, sehingga muncul perlawanan yang digerakkan oleh penduduk pribumi yang dibantu oleh para ulama serta didukung oleh kalangan bangsawan kerajaan. Meskipun demikian keadaan tidak berubah, pemerintahan Islam tetap terbelenggu oleh jerat kolonialisme.²

Pada fase pasca kemerdekaan (fase Orde Lama dan Orde Baru) keadaan perkembangan Islam politik tetaplah sama. Secara garis besar, ideologi nasionalis berhasil mengungguli ideologi Islam, sehingga pada masa ini, Islam mengalami pelemahan walaupun jumlah pemeluknya terbesar. Terpusatnya kekuasaan negara di tangan rezim militer menyebabkan umat Islam termarginalisasi sehingga berdampak pada perjalanan peradabannya, namun pada era tersebut hanya memunculkan sedikit perlawanan dalam bidang politik.

Pasca Orde Baru merupakan era terbukanya kebebasan masyarakat dalam berpolitik, namun demikian era ini tidak dimanfaatkan sebagian kelompok Islam untuk menggantikan posisi rezim Orde Baru dalam memimpin di kancah politik Nasional. Masa-masa ini pada realitasnya justru memunculkan partai-partai Islam yang saling berebut pengaruh di masyarakat sehingga menimbulkan kekeruhan dalam suasana politik Islam saat itu. Pada akhirnya partai-partai Islam itu, mendapatkan perolehan suara yang minim daripada partai-partai nasional sekuler.³

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis untuk memahami relasi antara islam dan politik dalam sejarah nasional indonesia.⁴ Sumber

¹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 5.

² Yudi Armansyah, "Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara," *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.

³ *Ibid.*, 28–29.

⁴ Andreas B. Subagyo, *Pengantar Riset Kuantitatif Dan Kualitatif, Termasuk Riset Teologi Dan Keagamaan* (Bandung: Kalam Hidup, 2004).

data utama penelitian ini meliputi dokumen-dokumen sejarah, literatur akademis, artikel, berita, dan sumber-sumber primer seperti pidato, surat-surat, dan tulisan-tulisan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Sumber-sumber ini memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa dan konteks politik yang berkaitan dengan Islam. Sumber data yang terkumpul dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi hubungan antara Islam dan politik dalam berbagai periode sejarah. Analisis konten melibatkan identifikasi tema-tema utama, perubahan kebijakan, peristiwa signifikan, dan peran aktor-aktor kunci dalam interaksi ini.

Data yang dianalisis kemudian diorganisir dalam urutan kronologis untuk memahami perkembangan hubungan antara Islam dan politik dari waktu ke waktu. Pemetaan ini membantu dalam mengidentifikasi tren, perubahan, dan transisi yang terjadi dalam hubungan ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor-faktor politik dan sosial, seperti perubahan rezim, gerakan sosial, dan tuntutan masyarakat, telah memengaruhi dinamika hubungan Islam dan politik. Hal ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang memicu perubahan dalam pandangan dan interaksi antara kedua bidang ini. Temuan-temuan dari analisis data kemudian diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas. Implikasi hubungan antara Islam dan politik dalam sejarah Indonesia dibahas, termasuk dampaknya terhadap dinamika politik dan masyarakat kontemporer. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, analisis historis, pemetaan kronologis, dan studi kasus, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas relasi antara Islam dan politik dalam sejarah nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam Di Indonesia

Masuknya Islam pada abad 13 ke Nusantara menyebabkan munculnya pusat-pusat kekuasaan politik yang berbasis Islam. Wilayah Sumatra telah mengalami perkembangan pada abad 14 dan abad 15 M. Memasuki awal abad 16 M, Jawa menjadi tempat munculnya hegemoni baru politik Islam di dalam sejarah. Sebagian besar merupakan Kerajaan Islam, sedang di daerah pedalaman masih bercorak Hindu. Di wilayah timur Nusantara, mulai wilayah Sulawesi dan Maluku, muncul pada abad ke-16 M. Di sisi yang lain, ada kerajaan Islam yang masih menggunakan sistem politik tradisional pra-Islam yakni Kerajaan Mataram Islam di Jawa bagian pedalaman.⁵

Sejarah nasional mencatat pada umumnya kerajaan-kerajaan Islam muncul pasca runtuhnya kekuasaan politik kerajaan Hindu dan Budha. Pada tahap selanjutnya, kerajaan yang bercorak Islam menjadi pemerintahan politik satu-satunya. Salah satu pemerintahan pertama politik yang bercorak ajaran Islam adalah kerajaan Samudra Pasai yang sekarang menjadi Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peran penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah Aceh pada pertengahan abad ke-16. Kemudian cikal bakal

⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992), 1500–1900.

berdirinya Kerajaan aceh berasal dari dua negeri kecil yaitu, Lamuri dan Aceh pada abad ke-16 M/abad ke-10 H.⁶

Kerajaan Demak yang berdiri sejak 1518 sampai 1550 muncul sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak berdiri pasca runtuhnya pemerintahan Majapahit pada tahun 1527 M. Menurut sumber sejarah versi sejarah Banten, pertentangan keduanya berlangsung hingga beberapa tahun. Barisan pasukan Islam Demak dipimpin oleh Pangeran Ngudung dan para ulama lainnya, melawan Majapahit yang dibantu oleh sekutunya dari Klungkung, Pengging, dan Terung.⁷

Kekuasaan Islam mengalami pergeseran ketika Kerajaan Islam Pajang berdiri di akhir abad ke-16 M. Pusat pemerintahan Pajang berada di wilayah pedalaman dengan kultur pertanian dan cocok tanam. Letak Pajang yang berada di pedalaman mengakhiri pengaruh politik pemerintahan Islam yang berpusat di pesisir Utara Jawa. Daerah pedalaman lebih sulit dipengaruhi oleh budaya dari luar.

Wilayah Nusantara bagian timur memiliki kerajaan-kerajaan Islam seperti di Banjarmasin, Makassar dan Ternate. Sejak awal abad ke-16 M, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan ekonomi, dengan dimulainya aktivitas perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke Maluku, berperan penting dalam aktivitas perdagangan ini. Pada masa itu, aktivitas perdagangan tersebut menjadi semakin ramai dengan berdatangnya para pedagang Arab.⁸

Kerajaan-kerajaan Islam saat itu, terlibat dalam banyak interaksi, salah satunya melalui hubungan politik seperti, hubungan kerja sama Demak dan Cirebon dalam penaklukan wilayah Banten dan Sunda Kelapa, kemudian kerjasama kerajaan-kerajaan Islam dalam pertempuran dengan Portugis dan Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan di wilayah nusantara.⁹ Hubungan komunikasi antar kekuasaan Islam sangatlah kuat sehingga terus eksis hingga kehadiran para penjajah Barat di wilayah nusantara.

Masa Penjajahan

Abad ke 17, wilayah Nusantara memasuki babak baru yaitu terjadinya hubungan antara Kerajaan Islam dengan negara-negara Barat terutama orang-orang Eropa yang berasal dari Belanda. Kekuasaan Belanda yang diwakili oleh VOC kemudian berkembang dari sebelumnya yang hanya menjadi bagian dari otoritas perdagangan saat itu kemudian berkembang sampai menguasai otoritas politik di Jawa. Hal ini menyebabkan tersingkirnya otoritas politik penguasa Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, para penguasa Islam menggantungkan legitimasi politiknya kepada orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda memiliki pengaruh yang lebih luas di pemerintahan kerajaan. Hal ini berdampak

⁶ Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 65.

⁷ *Ibid.*, 67.

⁸ *Ibid.*

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 224.

pada tersingkirnya ulama-ulama keraton sehingga mereka kehilangan otoritas sebagai penasihat sultan.

Dengan adanya kemunduran dalam bidang politik saat itu, berakibat pada hancurnya kehidupan ekonomi yang sebelumnya pernah berkembang pada masa Kerajaan Islam di periode abad ke-13 sampai abad ke-16 M. Penguasa kolonial semakin menancapkan hegemoninya dalam bidang politik dengan ditandai keberhasilan mereka dalam melakukan penetrasi politik dan eksploitasi ekonomi. Di tengah kondisi tersebut, rakyat pribumi lebih memilih mengikuti pemimpin spiritual seperti kelompok ulama dan bangsawan dalam menghimpun kekuatan untuk melawan dan berjuang melawan kediktatoran kolonial atas nama agama.¹⁰

Periode 1821 hingga 1837 M, berlangsung perang Padri yang dipimpin tokoh ulama yaitu Imam Bonjol. Pada mulanya Paderi adalah sekelompok yang sering melakukan ceramah di Surau dan Masjid. isi dari ceramah tersebut merupakan ajakan untuk menghilangkan adat masyarakat yang dipandang tidak selaras dengan ajaran Islam seperti mabuk, judi, dan sabung ayam yang saat itu sering dilakukan oleh masyarakat adat saat itu. Gerakan tersebut pada mulanya ditentang oleh masyarakat adat sehingga menyebabkan munculnya konflik diantara mereka yang meluas menjadi peperangan melawan kaum Padri. Dalam hal ini, masyarakat adat di dukung oleh pemerintah kolonial Belanda.¹¹

Sekitar tahun 1825-1830 di wilayah Jawa, terjadi perang yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Perang ini diawali dari rasa ketidakadilan yang disebabkan campur tangan Belanda terhadap kehidupan politik yang terjadi di dalam kesultanan Yogyakarta. selain itu, faktor lainnya adalah pembukaan jalan baru di daerah Tegalrejo Yogyakarta dengan melewati tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini menyebabkan Perang Jawa yang meluas hingga ke daerah Jawa Timur.¹² Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda dan menyebabkan perubahan politik yang signifikan terkhususnya di wilayah Jawa.

Jepang mulai menjajah wilayah Indonesia dari bulan Februari 1942 hingga bulan Agustus 1945. Jepang menawarkan kepada Indonesia kesempatan untuk kemerdekaan nasional dengan berbagai usaha yang dilakukan. Di sisi lain Jepang sesungguhnya memiliki tujuannya sendiri, yaitu mencari dukungan dalam Perang Asia Pasifik.¹³ Meskipun kekuasaan Jepang di Indonesia berlangsung secara singkat, namun Umat Islam mendapatkan panggung politik. Jepang mampu mempersatukan umat Islam Indonesia dalam satu wadah politik yang berbasis kekuatan Islam yaitu Masyumi. di dalam tubuh Masyumi banyak terdapat organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU.¹⁴

¹⁰ M. Surifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 32.

¹¹ M. Abdul Wahid, "Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia," *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 145.

¹² Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

¹³ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 143–144.

¹⁴ B. J. Boland, *Pergumulan Islam Di Indonesia 1946-1972* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 9–11.

Di periode akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, orientasi politik beralih dengan memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok nasionalis sekuler. Hal ini dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, namun jumlahnya lebih sedikit dari tokoh-tokoh nasionalis sekuler.¹⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, muncul perdebatan ideologis antara golongan Islam dan nasionalis sekuler. Para tokoh Islam mengusulkan gagasan pembentukan negara yang berlandaskan syariat Islam. Di sisi yang lain, kalangan nasionalis yang diwakili oleh Soepomo berpendapat bahwa Indonesia memiliki suatu keunikan tersendiri. Oleh karenanya, ia memiliki keraguan terhadap syari'at Islam yang belum tentu dapat mewadahi aspirasi masyarakat moderat mengenai gagasan negara.¹⁶

Supaya tidak memunculkan kembali perdebatan tentang ideologi negara, maka disepakati melalui kesepakatan bersama bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.¹⁷ Dirumuskannya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan timbal balik atas janji politik pemerintahan Jepang di Tokyo yang disampaikan oleh Perdana Menteri Koiso di depan parlemen Jepang pada 7 September 1944.¹⁸

Disepakatinya pancasila sebagai ideologi negara dan dihilangkannya tujuh kata dari Piagam Jakarta, hal ini dapat diartikan sebagai kekalahan kelompok Islam di kancah politik. Karena merasa aspirasinya politiknya tidak terpenuhi, maka sebagian dari mereka melakukan gerakan perlawanan salah satunya adalah melalui Gerakan Darul Islam (1949) yang diproklamasikan oleh Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).¹⁹

Masa Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, timbul masalah mendasar mengenai dasar ideologi negara. Para tokoh nasional yang tergabung di PPKI saat itu terbelah dua golongan, golongan pertama menginginkan negara berdasarkan unsur-unsur kebangsaan tanpa terikat dengan ideologi keagamaan tertentu, sementara golongan lainnya menginginkan Islam sebagai dasar negara.²⁰

Dalam sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945, Moh Hatta menggagas penghapusan kata “yang beragama Islam” karena presiden otomatis beragama Islam karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. sementara itu UUD dapat diterima oleh wilayah-wilayah yang mayoritas berkeyakinan selain Islam. Demikian juga Moh Hatta menyarankan agar menghapus kalimat yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan

¹⁵ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986), 81–82.

¹⁶ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996), 102–107.

¹⁷ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka, 1983), 26–27.

¹⁸ C. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti Pers, 1999).

¹⁹ Subandi Al-Marsudi, *Pancasila Dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 17.

²⁰ Wahid, “Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia,” 147.

syariat Islam bagi pemeluknya”. Hasil sidang kemudian menyetujui gagasan Hatta dan menghilangkan kesempatan ideology Islam sebagai ideologi politik bagi Republik Indonesia.²¹

Dalam Pemilu 1955, peluang untuk menjadikan Islam sebagai ideologi muncul kembali. Dalam Sidang Konstituante pada 10 November 1956 di Kota Bandung, mereka mengangkat kembali isu pokok seperti landasan dasar negara, bentuk negara, dan hal-hal lain dalam suatu Undang-Undang Dasar. Setelah tiga tahun masa sidang, masalah dasar negara masih belum terselesaikan. Partai-partai Islam seperti Masyumi, Perti, PSII, dan NU bersatu kembali untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Di pihak lain terdapat partai-partai non-agamis seperti PKI dan PNI yang tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.²²

Perbedaan pendapat tidak mampu diselesaikan. Hal ini membuat Majelis Konstituante dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi mengenai pembubaran Majelis Konstituante, pengembalian kembali UUD 1945 sebagai dasar negara, pembentukan MPRS dengan anggota yang berasal dari DPR dan DPD, dan pembentukan DPAS. Hal ini menjadikan perjuangan umat Islam kembali gagal.²³

Kabinet Djuanda diumumkan oleh Presiden Soekarno seminggu setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden. Kabinet ini menandai peralihan dari masa Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin.²⁴ Diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno, menandai periode yang dikenal sebagai masa Orde Lama. Kelompok Islam yang dipimpin oleh Mohammad Natsir menganggap demokrasi tersebut sebagai pemerintahan dengan sistem diktator.²⁵

Dalam fase ini, umat Islam saling terpecah satu sama lain, sekaligus terjadi gesekan dengan pemerintahan Soekarno. Adanya penerimaan dan penolakan sistem kekuasaan tersebut menjadikan umat Islam terpecah menjadi dua kelompok yang berseberangan, kelompok pertama yaitu Masyumi yang menentang ide Demokrasi Terpimpin dengan sikap keras, sementara kelompok yang tetap mendukung pemerintah terwakili oleh kelompok PSII, Perti, dan NU.

Masyumi kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 13 September 1960 melalui Surat Keputusan Presiden No. 200/1960 yang dipublikasikan pada 17 Agustus 1960. Perjalanan sejarah Orde Lama beserta sistem Demokrasi Terpimpinnya bubar pada tahun 1965, karena dilatarbelakangi tragedi G30S PKI, sekaligus pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada akhirnya umat Islam ikut serta dalam penumpasan gerakan

²¹ Ibid., 148.

²² Ibid., 149.

²³ Ibid., 150.

²⁴ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), 49.

²⁵ Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1987), 354.

tersebut, sekaligus mendukung pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.²⁶

Perjuangan umat Islam menghasilkan partai baru yang bernama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Namun partai ini memiliki konflik internal yang mencerminkan indikasi tidak sehat berupa ketidakmandirian yang dialami oleh umat Islam.²⁷ Konflik ini mencapai titik tertingginya bahkan sejak kongres pertama yang diselenggarakan di Malang. Pada kongres itu, Mohammad Roem akan diperkirakan menjadi ketua partai tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba terdapat pesan telegram yang dikirim oleh pemerintah Orde Baru yang mengatakan bahwa Mohammad Roem tidak diizinkan menjadi ketua partai tersebut.²⁸

Umat Islam mengalami kekecewaan sejak periode ini hingga akhir tahun 1980 atas sikap pemerintah terhadap Umat Islam.

“Kekecewaan lain yang dimaksud, antara lain: 1) kekecewaan atas gagalnya perjuangan umat Islam dalam legalisasi Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 45 selama sidang majelis Permusyawaratan Rakyat pada bulan Maret 1968, 2) Reaksi umat Islam atas dimasukkannya aliran kepercayaan di dalam GBHN dan status P4 pada sidang umum MPR 1978, 3) gugatan umat Islam atas diberlakukannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi parpol dan ormas pada sidang umum MPR 1982, 4) penanganan peristiwa Tanjung Periok pada 1984, dan lain sebagainya. “

Sikap pemerintah saat itu menyebabkan adanya perspektif di kalangan umat Islam yang melihat bahwa pemerintahan Orde Baru bersifat sekuler. Namun, keadaan tersebut mengalami perubahan menjelang dekade 90-an. Pemerintah mulai melunak terhadap kebebasan berekspresi umat Islam salah satunya dibuktikan dengan diizinkan pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang diketuai oleh B. J. Habibie. Namun tidak lama setelahnya, Orde Baru tumbang akibat demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan terjadinya peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan melahirkan era reformasi.

Masa Pasca Reformasi

Perkembangan Islam politik pada awal reformasi cukup untuk membangkitkan keinginan masa lalu dengan ide mengembalikan kejayaan umat Islam berupa sistem khilafah. Semenjak 15 tahun berjalannya era ini, umat Islam menghasilkan arah politik yang bersifat fundamentalis. Bahkan arah orientasi ini pada tingkat yang ekstrem mempunyai sifat (terror). Arah politik tersebut dianggap bertentangan dengan konsep reformasi yang mengedepankan asas-asas demokrasi.²⁹ Arah politik Islam yang fundamental ini, membuat golongan tersebut bersifat sangat eksklusif dalam beragama maupun dalam sikap politiknya. Mereka hanya berpegang pada nilai-nilai di dalam kitab suci al-Qur'an, Hadits Nabi, dan

²⁶ Wahid, “Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia,” 150–151.

²⁷ M. Rusli Karim, *Islam Dan Konflik Politik Era Orde Baru* (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), 3.

²⁸ Wahid, “Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia,” 152.

²⁹ Hermanu Joebagio, “Membaca Politik Islam Pasca Reformasi,” *JURNAL AGASTYA* 6, no. 1 (2016): 3.

hukum fiqh. Sedangkan, negara Indonesia terbentuk dari masyarakat yang majemuk dan tidak menerima unsur-unsur yang anarkis dan radikal.³⁰

Tidak mengherankan ketika Orde Baru runtuh, kemudian muncul reformasi yang ditandai dengan kemunculan partai Islam yang lebih dari 20 partai dengan memiliki basis-basis tersendiri, diantaranya: Partai Kebangkitan Umat, Partai Nahdlatul Umat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, dan lain-lain. Ada dua hal alasan munculnya partai Islam tersebut pada era reformasi awal: 1. Pada awal orba ada dua hal resistensi politik yang dihadapi pemerintah pada saat itu, paham komunis dan kelompok Islam. pada awalnya untuk menumpas komunisme, Orba bekerja sama dengan unsur-unsur golongan Islam. sesudah komunisme berhasil ditumpas, justru pemerintah Orba mulai marginalisasi kelompok Islam terutama yang tidak sejalan dengan kebijakan politik Orde Baru. Adapun bukti dari sikap tersebut yaitu diberangkannya berbagai organisasi Islam dan hanya diberi satu wadah aspirasi politik yaitu PPP. Sementara itu, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem politik yang hanya terdiri dari tiga partai yaitu Golkar, PDI, dan PPP.

Berdirinya parpol Islam, di satu pihak adalah wujud atas perayaan demokrasi, tetapi hal itu tidak diikuti dengan masifnya dukungan yang diperoleh sehingga mereka mengalami stagnasi. Dengan banyaknya partai Islam yang bermunculan justru mengakibatkan kesulitan dalam hal mencari dukungan, kecuali bagi mereka yang menerapkan basis masa militan.³¹

Pasca reformasi telah diselenggarakan beberapa kali pemilihan umum. Namun dari hasil pemilu tersebut, partai politik Islam hanya memperoleh hasil suara yang relatif kecil dan tidak lebih dari 10%. Ironisnya, jumlah pemilih yang menganut Islam justru berjumlah 88% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Hal tersebut menandai bahwa partai politik Islam tidak mewakili suara umat Islam yang berjumlah mayoritas itu.³²

Masalah prinsip tersebut terjadi karena dalam lingkup elie politik tersebut tidak mampu mengimplementasikan sistem politik demokrasi. Hal ini kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat pengelolaan terhadap basis massa partai politik Islam, sehingga berefek kepada rendahnya ketertarikan politik terhadap partai Islam oleh masa pemilih.³³

KESIMPULAN

Hubungan Islam dan politik yang terjalin di Negara Indonesia sudah terbentuk sejak lama. Dimulai dari munculnya kekuasaan Islam yang menggeser hegemoni Hindu dan Budha di wilayah Nusantara. Diawali oleh kekuasaan yang berpusat di daerah pesisir hingga bergeser ke daerah pedalaman, masing-masing ini memiliki hubungan yang sangat erat satu diantara lainnya. Memasuki permulaan abad ke 17 M, hegemoni kekuasaan Islam

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 5.

³² R. William Liddle Saiful Mujani and Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif Dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 371–467.

³³ Joebagio, "Membaca Politik Islam Pasca Reformasi," 6.

mengalami masa kemunduran akibat campur tangan bangsa Eropa yang semakin meluas hingga akhirnya para penguasa Islam tunduk dibawah kekuasaan pemerintah kolonial. Sehingga berdampak kepada para ulama keraton yang tersingkir perannya sebagai penasihat raja. Masa pendudukan Jepang merupakan era baru setelah berakhirnya kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Di masa itu juga menandai kembalinya pengaruh Islam dalam politik pemerintahan. Sumbangsih Jepang dalam politik di fase ini terlihat dalam upaya mereka menyatukan semua golongan Islam dalam satu wadah yang bernama Masyumi.

Pada masa kemerdekaan yang ditandai dengan lahirnya orde lama memunculkan konflik antara golongan nasionalis sekuler dengan golongan nasionalis Islam terkait dengan dihapusnya tujuh kata rumusan pertama dalam Piagam Jakarta. Kegagalan ini direspon oleh sebagian kelompok Islam untuk memperjuangkan Negara Islam Indonesia, salah satunya adalah Kartosuwiryo. Dalam sisi yang lain, peluang untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di dalam politik nasional kembali menguat ketika diselenggarakan pemilu 1955. Akan tetapi harapan itu pupus karena pemerintah orde lama mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Majelis Konstituante. Pergeseran kekuasaan negara dari orde lama ke orde baru juga tidak merubah keadaan. Orde baru semakin kuat dengan dasar ideologi Pancasila.

Pasca lengsernya Orde Baru dan dimulainya babak baru era reformasi memberikan angin segar kepada politik Islam untuk mengusahakan kembali harapannya tentang pendirian Negara Islam Indonesia dengan melalui pemilu 1999. Akan tetapi, dengan terbukanya pintu demokrasi, justru membuat mereka kehilangan basis massanya, dikarenakan suara pemilih partai Islam tidak mencerminkan kekuatan pemilih mayoritas hal ini dikuatkan dengan banyaknya partai-partai Islam yang muncul yang mengakibatkan pecahnya suara di kalangan umat Islam.

REFERENSI

- Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila Dan UUD 45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Andreas B. Subagyo. *Pengantar Riset Kuantitatif Dan Kualitatif, Termasuk Riset Teologi Dan Keagamaan*. Bandung: Kalam Hidup, 2004.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka, 1983.
- Armansyah, Yudi. "Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara." *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2017): 27–46.
- Boland, B. J. *Pergumulan Islam Di Indonesia 1946-1972*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- Dijk, C. Van. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1999.
- Effendy, Fachry Ali dan Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1986.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*.

- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Joebagio, Hermanu. "Membaca Politik Islam Pasca Reformasi." *JURNAL AGASTYA* 6, no. 1 (2016).
- Karim, M. Rusli. *Islam Dan Konflik Politik Era Orde Baru*. Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1992.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Noer, Deliar. *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- Rais, Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Saiful Mujani, R. William Liddle, and Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih Dalam Pemilihan Legislatif Dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika, 2012.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sunanto, M. Surifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Wahid, M.Abdul. "Pergumulan Islam Dan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politik Profetik* 7, no. 1 (2019): 145.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.